

# STRATEGI INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI RADIKALISME DALAM KURIKULUM SMA/MA

MUH. SYA'RONI

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STIT AF Al-Fattah

---

---

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 14-01-2019

Disetujui: 17-01-2019

---

### Kata kunci:

Kurikulum, Radikalisme,

Integrasi

---

---

## ABSTRAK

**Abstract:** Anti-radicalism education is education to reject radicalism. The equivalent of the term that is also often used is Deradicalism. Integration of anti-radicalism education in the SMA / MA curriculum can be done by strategies to change curriculum philosophy, add curriculum content, regulate learning methods, and use appropriate evaluation tools. Implementation of anti-radicalism education integration in the SMA / MA Curriculum is done by integrating Anti Radicalism Education Values as long as Citizenship, Compassion, Courtesy, Fairness, Moderation Respect for others, Respect for the creator, Self control, and Tolerance into curricular, extracurricular activities habituation, and self-development which is held in SMA / MA.

**Abstrak:** Pendidikan anti radikalise merupakan pendidikan untuk menolak paham radikalisme. Padanan istilah yang juga sering digunakan adalah Deradikalisme. Integrasi pendidikan anti radikalisme dalam Kurikulum SMA/MA dapat dilakukan dengan strategi merubah filosfi kurikulum, menambah konten kurikulum, mengatur metode pembelajaran, dan penggunaan alat evaluasi yang tepat. Implementasi integrasi pendidikan anti radikalisme dalam Kurikulum SMA/MA dilakukan dengan mengintegrasikan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Radikalisme serperi *Citizenship, Compassion, Courtesy, Fairness, Moderation Respect for other, Respect for the creato, Self control, dan Tolerance* ke dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, pembiasaan, dan pengembangan diri yang diselenggrakan di SMA/MA.

---

## Alamat Korespondensi:

Muh. Sya'roni,  
PAI/Prodi Pendidikan Agama Islam  
STIT Al-Fattah  
Siman, Sekaran, Lamongan, Jawa Timur  
E-mail: kangroni1981@gmail.com

---

---

Peserta didik setara SMA/MA dari segi usia berada pada masa remaja (12-21 tahun). Usia ini merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Itulah sebabnya para peserta didik SMA/MA pada masa ini banyak melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan jati dirinya (*ego identity*). Perkembangan peserta didik usia tersebut ditandai dengan sejumlah karakteristik penting antara lain: (1) Memperoleh hubungan yang matang dengan teman sebaya, (2) Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, (3) Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, (4) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, (5) Memilih dan mempersiapkan karir di masa depannya sesuai dengan minat dan kemampuannya, (6) Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak, (7) Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, (8) Mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, (9) Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku, dan (10) Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan pengalaman keberagamaannya (Hasan, 2016).

Secara psikologis, usia remaja adalah usia yang rentan, tidak stabil, dan belum matang sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk paham radikalisme agama. Lebih-lebih remaja tersebut tergolong keluarga miskin dan kurang memiliki pemahaman tentang ajaran Islam yang benar, maka akan sangat mudah diajak untuk bergabung dalam gerakan radikalisme.

Sejumlah peristiwa radikalisme dan bahkan terorisme yang terjadi di Indonesia telah membuktikan keterlibatan anak muda. Peristiwa terorisme seperti bom Bali I dan II, bom Kuningan, bom di depan kedutaan Australia, bom di masjid Polres Cirebon, bom di Gereja Injil Sepenuh Solo, dan peristiwa lainnya semuanya ada nama-nama anak muda. Semua peristiwa tersebut digerakkan dan dilakukan anak-anak muda berusia 17–35 tahun.

Di Barat, menurut data yang dirilis Europol, di antara 706 aktivis radikal yang ditangkap di Eropa pada 2006, lebih dari 2/3 atau lebih dari 470 orang terdiri atas anak muda berusia 26–41 tahun. Di beberapa negara di benua tersebut, terutama Inggris, terdapat sejumlah pelaku dengan usia yang jauh lebih muda, yakni 17 dan 19 tahun (Hilmy, 2015). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ideologi radikalisme memiliki daya pesona yang cukup kuat bagi anak muda, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju.

Keikutsertaan kaum muda terhadap ideologi radikalisme merupakan isu yang harus dicermati di tengah bonus demografi yang tengah berlangsung di negeri ini. Di antara total 250 juta penduduk pada tahun 2015, terdapat 66,5 persen (163 juta jiwa) penduduk usia produktif (15–65 tahun). Jika ledakan usia angkatan kerja produktif tidak dikelola dengan baik, bonus demografi ini dapat menjadi musibah dari pada berkah. Pada saatnya nanti, ledakan penduduk bisa menimbulkan berbagai bentuk permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketimpangan sosial, dan semacamnya. Dalam kondisi semacam ini, paham radikalisme keagamaan rawan menjangkiti anak muda. Seandainya ada 1 persen saja pemuda Indonesia yang terjangkit virus radikalisme maka akan ada 1.630.000 jiwa yang menganut paham radikalisme

Banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini belum memahami arti keragaman dan perbedaan. Tidak sedikit di antara manusia yang hendak meniadakan kebhinekaan (*plurality*) dan menggantinya dengan ketunggalan dan keseragaman (*uniformity*). Ironisnya, para teroris dan kaum radikal mengklaim bahwa semua itu dilakukan karena perintah agama (Islam).

Salah satu doktrin Islam yang kerap dijadikan landasan oleh para teroris adalah jihad. Padahal, jihad mempunyai arti yang luas. Jihad tidak identik dengan melakukan pengeboman atau tindak kekerasan lainnya. Jihad dapat dilakukan dalam bentuk jihad individual seperti menahan hawa nafsu, jihad dengan harta benda, jihad intelektual, maupun bentuk jihad yang lainnya. Jihad fisik mungkin saja dilakukan, asalkan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada cara lain. Selain itu, ada prasyarat yang cukup ketat sebelum jihad fisik itu dilakukan (Naim, 2012).

Diakui atau tidak, pendidikan ikut berkontribusi dalam pembentukan pola pikir yang eksklusif. Dalam konteks inilah, proses pembelajaran di sekolah perlu mendapat perhatian. Sebab nyatanya sekolah tidak cukup mampu melahirkan peserta didik yang toleran, moderat, dan inklusif. Buktinya antara lain dapat dilihat dari banyaknya pelaku terorisme dan radikalisme Islam yang melibatkan pemuda, baik pelajar, mahasiswa, maupun lulusan perguruan tinggi. Dani Dwi Permana misalnya, seorang pelajar kelas XI SMA ini adalah pelaku peledakan bom di hotel JW Marriot. Dari pihak mahasiswa terdapat nama Maruto Jati Sulisty, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung, Semarang. Contoh lain Fajar Firdaus, Sonny Jayadi, dan Afham Ramadhan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, yang diduga kuat telah menyembunyikan dan memberikan bantuan berupa tempat tinggal kepada Syaifudin Zuhri dan Mohamad Syahrir, pelaku pengeboman Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009. Selain mereka, teroris lain yang usianya relatif muda adalah Muhammad Syarif, pelaku bom bunuh diri di masjid Mapolres Cirebon dan Ahmad Yosepa Hayat, pelaku bom bunuh di GBIS, Kepunton, Solo (Ma'rifah, 2016).

Dalam rangka mengantisipasi semakin maraknya keterlibatan anak muda dalam lingkaran ideologi radikalisme, satuan pendidikan sebagai tempat penggembelangan generasi muda dituntut mendesain kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan anti radikalisme yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda. Masa depan bangsa Indonesia ada di pundak generasi muda saat ini, ketika generasi muda sudah terjangkit virus radikalisme yang begitu cepat penyebarannya melalui berbagai media, maka masa depan bangsa ini akan suram dan negara, dalam hal ini diwakili oleh satuan pendidikan, adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Untuk menjawab problem tersebut, maka diperlukan suatu formula yang mampu menghadirkan pendidikan anti radikalisme sebagai benteng pertahanan anak muda untuk menghalau virus radikalisme. Mengingat besarnya jumlah mata pelajaran SMA yang harus dikuasai oleh peserta didik, rasanya sekolah/madrasah tidak mungkin

menambahkan lagi satu mata pelajaran, yakni Pendidikan Anti Radikalisme. Untuk itu cara yang paling tepat adalah integrasi pendidikan anti radikalisme ke dalam sejumlah mata pelajaran yang dianggap relevan dan berbagai kegiatan ekstra kurikuler. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis akan mengkaji strategi integrasi pendidikan anti radikalisme dalam kurikulum SMA/MA.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian putaka (*Library Research*). Subjek dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan tema penelitian. Pertimbangan utama dalam menentukan subyek penelitian ini adalah kesesuaian antara sumber informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, maka penulis membatasi subyek dalam penelitian ini dalam dua kelompok; yakni sumber informasi kunci (Subyek Mayor) dan sumber informasi pendukung (Subyek Minor)

Sumber mayor dalam penelitian ini adalah Buku – buku yang menjadi subyek mayor dalam penelitian ini yang terdiri dari Buku yang Berkaitan dengan Pendidikan Anti Radikalisme dan Buku tentang Kurikulum SMA/MA. Adapun sumber minornya adalah; Buku-Buku yang terkait dengan Pengembangan Kurikulum., Buku-Buku yang terkait dengan Pembelajaran, Buku-Buku yang terkait dengan Manajemen Sekolah, dan buku – buku yang relevan

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menelusuri berbagai buku yang terkait dengan tema yang penulis teliti, yakni buku-buku yang terkait tentang proses pembelajaran dan buku-buku tentang pendidikan anti radikalisme.

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Induktif. Metode ini digunakan ketika penulis mendapatkan data-data yang memiunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum
2. Metode Deduktif. Metode ini digunakan ketika penulis mendapatkan pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya
3. Metode Deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk mendiskripsikan segala suatu yang berkaitan dengan pokok pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang obyek permasalahannya.

## PEMBAHASAN

### Genealogi Radikalisme

Radikalisme merupakan sikap atau tindakan terhadap berbagai perubahan tatanan kehidupan yang sudah lama dan mapan (*established*). Perbedaan antara reaksioner dan radikalisme menurut Eggi Sudjana adalah pada aspek tujuannya. Kaum reaksioner menginginkan perubahan tatanan masyarakat dalam batas-batas tertentu dan masih mentolerir sebagian tatanan yang ada, sedangkan kaum radikal justru menginginkan perubahan tatanan yang ada ke akar-akarnya bahkan jika perlu dilakukan dengan kekerasan (revolusi berdarah) (Sudjana, 2008:100).

Istilah lain yang berdekatan makna dengan radikalisme adalah fundamentalisme. Fundamentalisme adalah sebuah keniscayaan dalam setiap agama. Fundamentalisme muncul sebagai salah satu akibat modernisasi, sehingga semua agama yang bersinggungan dengan modernisasi akan memunculkan gerkan fundamental. Oleh karena itu muncul Yudaisme Fundamental, Kristen Fundamental, Hindu Fundamental, Sikh Fundamental dan bahkan konfusianisme Fundamental (Hambali, 239).

Menurut faham kaum fakta sosial, radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Genealogi radikalisme dapat ditilik dari beberapa penyebab antara lain, yaitu: *pertama*, tekanan politik penguasa terhadap keberadaanya. *Kedua*, kegagalan rezim sekular dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, respon terhadap barat (Nasir, 2006: 231-235).

Dalam dunia Islam, istilah radikalisme muncul seiring dengan gerakan Islam di Iran yang ternyata dapat menghancurkan kekuatan Syah Iran yang didukung oleh Amerika Serikat. Dibawah komando para Imam Syi'ah, khususnya Ayatullah Khomeini, kaum Syiah yang anti terhadap rezim otoriter Syah Iran melakukan pemberontkan yang berakhir dengan kemenangan Kaum Syiah garis keras tersebut. Gerakan-gerakan para *Mullah* yang didukung oleh rakyat secara penuh inilah yang menghasilkan konseptual sebagai gerakan Islam fundamental atau radikal (ibid, 238-239).

Gerakan radikal Islam di Indonesia sudah nampak sejak periode awal kemerdekaan. Martin van Bruinessen (2002) mengungkapkan, sejumlah gerakan Islam radikal memiliki akar historis pada Masyumi dan Darul Islam (DI). Gerakan-gerakan ini mulai mengalami pasang naik sejak awal 1980-an menyusul berbagai perubahan di aras global, antara lain Revolusi Iran pada tahun 1979, serta perubahan di aras domestik, antara lain fragmentasi elit sejak akhir 1980-an. Noorhaidi Hassan (2010) berpendapat bahwa faktor penting lainnya untuk menjelaskan maraknya gerakan radikal Islam pada masa itu adalah tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia: sekitar 72,5% pengangguran di Indonesia pada tahun 1997 berasal dari kaum muda—hanya beringsut sedikit ke angka 70% sepuluh tahun kemudian (Azca, 2013:17).

Saat ini gerakan Islam yang berkonotasi radikal di Indonesia antara lain adalah Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Laskar Jihad, Gerakan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan berbagai gerakan keagamaan bercorak lokal adalah potret tentang merebaknya gerakan-gerakan keagamaan di tengah euphoria keterbukaan, demokratisasi dan hak asasi manusia (Nasir, 233).

### **Integrasi Pendidikan Anti Radikalisme dalam Kurikulum Sekolah**

Istilah Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Poerwadarminto mengartikan integrasi adalah penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh (Poerwadarminto, 1986:384). Dalam ilmu sosial, integrasi dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Misalnya integrasi orang Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia tanpa kehilangan identitas dan tata kehidupannya yang serba eksklusif, dan mereka merupakan suku baru yang setingkat dengan suku Jawa, Sunda, dan sebagainya (Yayasan Tunas Bangsa, 1977:14).

Pendidikan anti radikalise adalah pendidikan untuk menolak faham radikalisme. Istilah yang juga sering digunakan adalah Deradikalisme. Untuk mendesain integrasi Pendidikan Anti Radikalisme dalam kurikulum, cukup relevan menyimak pendapat Syamsul Ma'arif yang menawarkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Filosofi kurikulum yang dikembangkan mestilah menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bangsa dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresivisme, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.

*Kedua*, teori kurikulum tentang konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan ketrampilan yang harus dimiliki generasi muda.

*Ketiga*, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan peserta didik dalam suatu kondisi *free value*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.

*Keempat*, proses belajar yang dikembangkan untuk peserta didik haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan peserta didik belajar individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antar-individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan peserta didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

*Kelima*, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan *content* yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan (Ma'arif, 2006: 26-30).

Kata kurikulum semula dipakai di dunia atletik yang berarti jarak tertentu yang harus ditempuh dalam waktu tertentu, kemudian dipakai di dunia pendidikan. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* artinya pelari dan *curere* artinya tempat berpacu. Dalam bahasa arab kata kurikulum biasa diungkapkan dengan istilah *manhaj* yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai kehidupan (Abdullah idi, 2014:229-230).

Secara terminologi, kurikulum dapat didefinisikan ke dalam dua pengertian, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kurikulum dalam arti sempit merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Pengertian dalam arti sempit ini meliputi empat komponen yang harus ada dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi atau bahan, organisasi dan strategi. Kurikulum dalam arti ini lebih relevan dipahami dan dilakukan oleh guru dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah.

Sedangkan dalam arti luas, kurikulum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu kegiatan/aktifitas yang dirancang oleh suatu lembaga pendidikan untuk disajikan kepada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan institusional, tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional (Sujana, 1989:3).

Dengan demikian yang dimaksud dengan integrasi pendidikan anti radikalisme dalam Kurikulum SMA/MA adalah proses penyesuaian antara pendidikan anti radikalisme dengan semua komponen yang ada di dalam kurikulum sehingga menghasilkan pola pendidikan yang memiliki keserasian fungsi.

Untuk mengimplemmentasikan integrasi perlu dilakukan proses Penyusunan dan pengembangan Kurikulum SMA yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dapat dibentuk dalam format rapat kerja atau loka karya sekolah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan dan pengembangan Kurikulum secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draf, *review*, finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun

Dengan diterapkannya KTSP/ Kurikulum 2013 sekolah maka sekolah atau satuan pendidikan mendapat kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulum sepanjang masih mengacu pada Standar Isi dan Standar Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Pendidikan (BNSP) sesuai dengan tuntutan lokal maupun global, sehingga sekolah dapat memenuhi keinginan siswa atau masyarakat pada umumnya. Hal ini berbeda sekali dengan kurikulum sebelumnya yang sifatnya sentralistik dan akhirnya berakibat banyak sekali muatan-muatan kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan yang diterima bersifat sia-sia. Dalam implementasi KTSP/Kurikulum 2013, peran seluruh elemen sekolah sangat dominan pengaruhnya terutama guru. Menurut Murray Printr (1993), ada empat peran guru dalam level ini, yaitu: *implementers* (guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada), *adapters* (guru sebagai penyalaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan daerah), *developers* (guru berperan sebagai pengembang kurikulum), dan *reseachers* (guru berperan sebagai peneliti kurikulum) (Sanjaya, 2008:27-30).

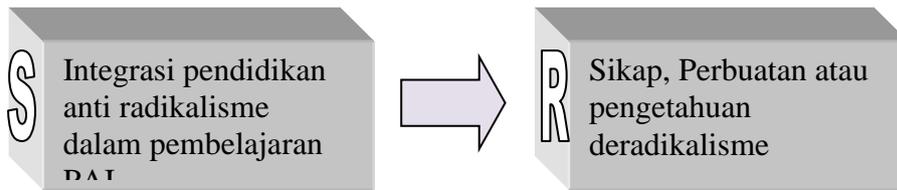
Penyusunan Kurikulum pada SMA dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli pendidikan dan tokoh agama, instansi yang relevan di daerah setempat seperti tokoh masyarakat, instansi pemerintah dan swasta termasuk perusahaan dan industri sekitar dan juga perguruan tinggi (Mulyasa, 2007:150) Bantuan teknis dalam pengembangan KTSP/Kurikulum 2013 dapat diperoleh dari BNSP, dan PUSKUR Balitbang Depdiknas.

### **Strategi Integrasi Pendidikan Anti Radikalisme dalam Kurikulum SMA/MA**

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu interaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Dari definisi ini maka menurut Thorndike perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud kongkrit yaitu yang dapat diamati, atau tidak kongkrit yaitu yang tidak dapat diamati.

Berangkat dari teori tersebut di atas, integrasi pendidikan anti radikalisme dalam proses pembelajaran merupakan bentuk Stimulus yang berupa pembelajaran yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan Respon yang berupa Sikap, Perbuatan atau pengetahuan yang dapat membentengi peserta didik dari pengaruh radikalisme.

Strategi yang dilakukan adalah mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti radikalisme dalam proses pembelajaran di SMA/MA yang terdiri atas Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan pembelajaran; Materi Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Media dan atau Sumber Ajar; dan Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dalam bagan berikut ini:



Mengacu pada teori tersebut dan pendapat Syamsul Ma'arif, Strategi integrasi Pendidikan Anti Radikalisme dalam kurikulum SMA dapat dilakukan dengan cara:

1. Merubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Dalam hal ini, nilai-nilai atau ajaran yang mengandung faham radikalisme sudah harus bersih sampai pada ranah filosofis pendidikan
2. Menerapkan teori kurikulum tentang konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan ketrampilan yang harus dimiliki generasi muda. Dalam hal ini konten yang ada di dalam kurikulum harus menunjukkan fakta-fakta gerakan radikalisme yang menjadi ancaman bangsa Indonesia berikut nilai-nilai apa yang harus melekat pada peserta didik sehingga mampu menjadi benteng pertahanan dari pengaruh virus radikalisme
3. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan terbiasanya belajar yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik, peserta didik secara tidak sadar telah mendapatkan interalisasi nilai-nilai kerukunan, keharmonisan, toleransi, demokrasi dan jauh dari radikalisme
4. Proses belajar yang dikembangkan untuk peserta didik haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan peserta didik belajar individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antar-individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan peserta didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.
5. Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan *content* yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan

Untuk merealisasikan pendidikan anti radikalisme bagi peserta didik SMA/MA, sekolah dapat melaksanakannya dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti radikalisme dalam seluruh kegiatan sekolah, terutama kegiatan pembelajaran PAI dan PPKN. Nilai-nilai pendidikan anti radikalisme yang dapat diimplementasikan antara lain adalah nilai-nilai pendidikan anti terorisme kurikulum karakter di Negara Bagian Georgia berikut ini :

1. *Citizenship*,  
*Citizenship* adalah kualitas pribadi seseorang terkait hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga bangsa. Misalnya hak dan kewajiban dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan IPTEK dengan prinsip kemaslahatan bangsa dan negara.
2. *Compassion*  
*Compassion* adalah peduli terhadap penderitaan atau kesedihan orang lain serta mampu menanggapi perasaan dan kebutuhan mereka.
3. *Courtesy*  
*Courtesy* adalah berperilaku santun dan berbudi bahasa halus sebagai perwujudan rasa hormatnya terhadap orang lain.
4. *Fairness*  
*Fairness* adalah perilaku adil, bebas dari favoritisme maupun fanatisme golongan.

5. *Moderation*

*Moderation* adalah sikap menjauhi pandangan dan tindakan yang radikal dan ekterm yang tidak rasional.

6. *Respect for other*

*Respect for other* adalah sikap menghargai hak-hak dan kewajiban orang lain.

7. *Respect for the creator*

*Respect for the creato* adalah sikap menghargai segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta dan merasa berkewajiban untuk selalu menjalankan perintahNya dan menjauhi segala laranganNya serta senantiasa bersyukur kepadaNya.

8. *Self control*

*Self control* adalah mampu mengendalikan diri melalui keterlibatan emosi dan tindakan seseorang.

9. *Tolerance*

*Tolerance* adalah sikap dapat menerima penyimpangan dari hal yang dipercayai atau praktik-praktik yang berbeda dengan yang dilakukan atau dapat menerima hal-hal yang berseberangan dengan apa-apa yang telah menjadi kepercayaan diri (Samani, 2000: 56).

### **Implementasi Integrasi Pendidikan Anti Radikalisme dalam Kurikulum SMA**

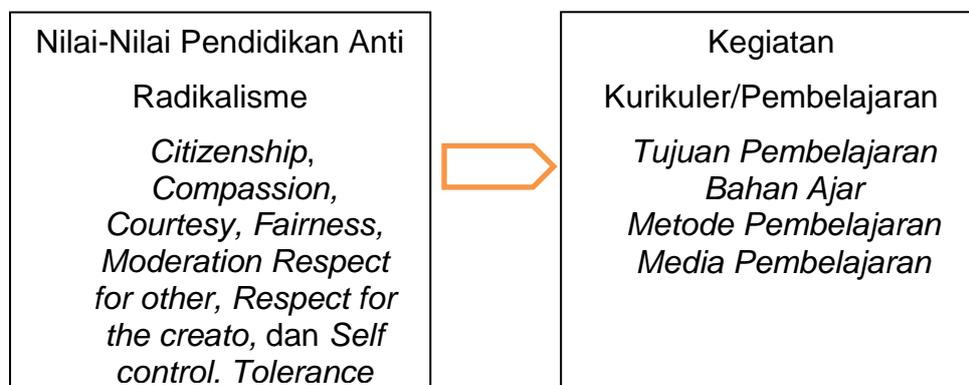
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa implementasi kurikulum SMA dilaksanakan dalam 4 bentuk kegiatan, yakni kurikuler, ekstrakurikuler, pembiasaan, dan pengembangan diri

#### **1. Kegiatan Kurikuler**

Kegiatan kurikuler adalah adalah kegiatan pembelajaran mata pelajaran sesuai dengan ketentuan kuriulum standar nasional. Dalam setiap proses pembelajaran setidaknya terdapat enam komponen utama, yaitu; Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran (bahan ajar), Metode Pembelajaran, dan Media pembelajaran. Integrasi pendidikan anti radikalisme dalam kegiatan kurikuler ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam Tujuan Pembelajaran Materi Pembelajaran (bahan ajar), Metode Pembelajaran, dan Media pembelajaran.

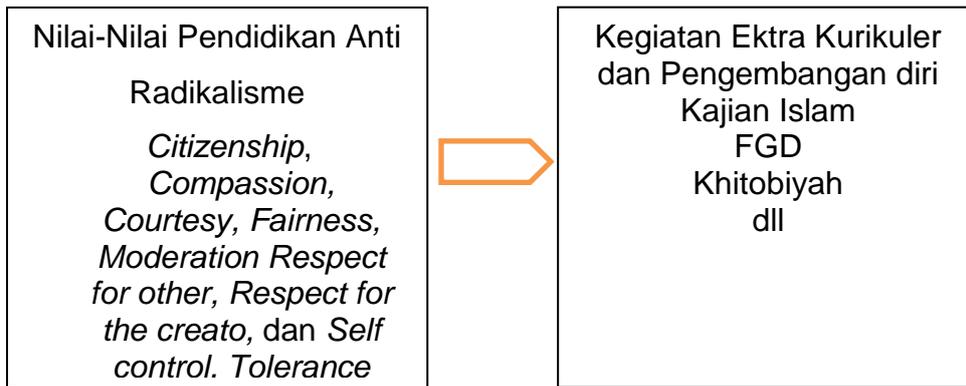
Dalam merumuskan tujuan pembelajaran guru PAI hendaknya memasukkan nilai-nilai pendidikan anti radikalisme yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah digariskan oleh kurikulum. Demikian pula dalam membuat bahan ajar, menentukan metode, dan media pembelajaran.

Nilai-nilai pendidikan anti radikalisme yang dimaksud adalah *Citizenship, Compassion, Courtesy, Fairness, Moderation Respect for other, Respect for the creato, dan Self control Tolerance.*



#### **2. Kegiatan Ektra Kurikuler dan Pengembangan Diri**

Integrasi pendidikan anti radikalisme dalam kegiatan ekstra kurikuler dan Pengembangan Diri sekolah dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti radikalisme yang relevan dalam kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan sekolah. Misalnya kegiatan kajian Islam, dalam mengkaji ajaran islam, guru dapat memberi penekanan pada pembahasan yang ada sangkut pautnya anti radikalisme.



### 3. Kegiatan Pembiasaan

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti radikalisme dalam kegiatan pembiasaan sekolah dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut:

No	Pendidikan Anti Radikalisme	Bentuk Kegiatan
1	<i>Citizenship</i>	Upacara Bendera dan hari-hari besar Nasional atau Agama
2	<i>Compassion,</i>	Setiap kali ada siswa yang tertimpa musibah, siswa-siswa yang lain diajak untuk memberi sumbangan
3	<i>Courtesy,</i>	Mewajibkan siswa bertutur kata santun yang santun, misalnya pada hari-hari tertentu siswa diwajibkan berbahasa jawa <i>krama inggil</i>
4	<i>Fairness,</i>	Selalu menegakkan perilaku adil, bebas dari favoritisme maupun fanatisme golongan dalam menyelesaikan persoalan di sekolah
5	<i>Moderation</i>	Siswa selalu dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan-persolan yang berkaitan dengan kepentingan bersama
6	<i>Respect for other</i>	Sekolah menegakkan tata tertib dan norma-norma di Sekolah
7	<i>Self Control</i>	Siswa dilatih mampu mengendalikan diri melalui keterlibatan emosi dan tindakan seseorang.
8	<i>Respect for the creator,</i>	Siswa diajak membiasakan diri menjalani perintah dan menkauhi larangan Allah. Misalnya mengadakan sholat jamah dhuhur, baca al-Qura'an dan lain-lain
9	<i>Tolerance</i>	Sekolah memberi stimulus kepada siswa agar memiliki sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Misalnya membentuk kelompok belajar dari siswa yang beragam latar belakangnya

### SIMPULAN

- Integrasi pendidikan anti radikalisme dalam Kurikulum SMA/MA adalah proses penyesuaian antara pendidikan anti radikalisme dengan semua komponen yang ada di dalam kurikulum sehingga menghasilkan pola pendidikan yang memiliki keserasian fungsi
- Strategi Integrasi Pendidikan Anti Radikalisme dalam kurikulum SMA/MA dapat dilakukan dengan cara a) Merubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan.; b) Menerapkan teori kurikulum yang tidak hanya mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, dan melainkan mencakup pula nilai,

- moral, prosedur, dan ketrampilan yang harus dimiliki. Dalam hal ini konten yang ada di dalam kurikulum harus menunjukkan fakta-fakta gerakan radikalisme yang menjadi ancaman bangsa Indonesia berikut nilai-nilai apa yang harus melekat pada peserta didik sehingga mampu menjadi benteng pertahanan dari pengaruh virus radikalisme; c) Teori belajar yang digunakan memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik. d) Proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial. e) Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik.
3. Implementasi integrasi pendidikan anti radikalisme dalam kurikulum SMA/MA dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Radikalisme seperti *Citizenship, Compassion, Courtesy, Fairness, Moderation Respect for other, Respect for the creato, Self control, dan Tolerance* ke dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, pembiasaan, dan pengembangan diri yang diselenggarakan di SMA/MA

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulah Idi, *Pengembangan kurikulum Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014
- Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami : Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pasca Kematian*, Jakarta : Rajawali Press, 2006
- Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, Jakarta : Rajawali, 2008
- E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Indriani Ma'rifah, *Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam*, ([http://eprints.uinsby.ac.id/232/1/Buku%201\\_241.pdf](http://eprints.uinsby.ac.id/232/1/Buku%201_241.pdf)) diakses pada tanggal 09 Juli 2016
- Masdar Hilmy, *Anak Muda di Tengah Pusaran Radikalisme*, Artikel Jawa Pos, 27 Maret 2015
- Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung : Rosda, 2011
- Muhammad Najib Azca, *Yang Muda, Yang Radikal MAARIF* Vol. 8, No. 1 — Juli 2013
- Nana Sujana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar baru. 1989
- Ngainun Naim, “*Strategi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Perspektif Pendidikan*”, makalah Simposium Nasional “Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme”, di Jakarta, 15 Juli 2011. <http://www.lazuardibirru.org/wp-content/uploads/else/pdf/strategi-penganan-radikalisme-dan-terorisme.pdf>. Diunduh pada 10 September 2012.
- Nur Syam dalam Ridlwan Nasir (ed), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya, IAIN Pres dan Lkis, 2006.
- Syamsul Ma'arif, “Islam dan Pendidikan Pluralisme (Menampilkan Wajah Islam Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan)”, hlm. 17, makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies, di Lembang, Bandung pada tanggal 26-30 November 2006.
- Satono Kartodirejo, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Koentjoro Ningrat (Ed), Jakarta: Grafindo, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Ii* Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Yayasan Tunas Bangsa, *Lahirnya Konsep Assimilasi*, Jakarta: Gramedia, 1977
- Yoyo Hambali, “*Fundamentalisme dan Kekerasan Agama*” dalam Ridlwan Nasir (ed), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya, IAIN Pres dan Lkis, 2006
- Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 27-30
- W.Y.S. Poerwadarminto, *Konsorsium Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986